

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 11

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	<input checked="" type="checkbox"/>


# Mantan Kepsek SMKN 1 Pulpis

## Tersangka

## Dana BOS

PULANG PISAU - Kejaksaan Negeri Pulang Pisau resmi menetapkan mantan Kepala SMKN 1 Kahayan Hilir, AM, tersangka kasus penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015, 2016 dan 2017. Bahkan statusnya saat ini sudah menjadi terdakwa, dan sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Palangka Raya.

“Setelah menerima hasil audit dari BPK, kita langsung naikkan statusnya menjadi tersangka, dan saat ini sudah terdakwa tinggal menunggu persidangan di PN Tipikor Palangka Raya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Triono Rahyudi saat menggelar rilis capaian kinerja Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020 di kantor

 ke Halaman 12

Sambung

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 12

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan <input checked="" type="checkbox"/>	

### **Mantan Kepsek...**

#### ● Sambungan Hal 11

Kejari setempat, Kamis (10/12).

Triono menjelaskan, modus operandi yang digunakan tersangka adalah menggunakan dana BOS tidak sesuai Juklak maupun Juknis. "Dan itu diindikasikan menguntungkan

diri sendiri maupun orang lain," tandasnya.

Selain menetapkan tersangka Dana BOS, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau juga menyampaikan bahwa saat ini sedang melakukan penyidikan Dana Desa (DD). Pada tahun ini juga Kejaksaan Negeri Pulang Pisau menangani perkara tindak pidana penyimpanan

gan Dana Desa (DD), yakni Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu.

"Ada belanja tidak sesuai dengan RAB dan indikasi kemahalan atau mark up. Kita tunggu masih memeriksa para saksi dan tim ahli teknis turun ke lapangan memeriksa kualitas maupun kuantitas pekerjaan," pungkasnya. c-mye